

Kontribusi Industri Halal terhadap Ekonomi Makro: Studi Komparatif Sektor Halal dan Non-Halal terhadap PDB

Azka Saqina Salsabila *¹

Seli Saelurrohmah Syam ²

Silvi Sa'adah ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002002@student.unsil.ac.id¹, 231002035@student.unsil.ac.id²,
231002044@student.unsil.ac.id³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Industri halal memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi baru, namun kontribusinya terhadap PDB nasional secara empiris masih memerlukan analisis mendalam, terutama jika dibandingkan dengan sektor non-halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kontribusi sektor industri halal dan non-halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta merumuskan strategi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data sekunder dari lembaga terkait. Analisis kontribusi dilakukan dengan pendekatan nilai tambah (value-added) untuk memisahkan output masing-masing sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri halal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, dengan sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan keuangan syariah sebagai pendorong utama. Meskipun secara agregat kontribusinya masih di bawah sektor non-halal, laju pertumbuhan sektor halal menunjukkan tren yang positif dan potensial. Berdasarkan temuan, dirumuskan strategi pengembangan yang berfokus pada penguatan ekosistem digital, peningkatan efisiensi sertifikasi, dan ekspansi pasar ekspor. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dukungan kebijakan yang lebih terfokus untuk mengoptimalkan potensi industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi makro yang berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Makro, Industri Halal, PDB, Sektor Non-Halal

Abstract

The halal industry has great potential as a new engine of economic growth, yet its empirical contribution to the national GDP requires in-depth analysis, especially when compared to the non-halal sector. This study aims to analyze and compare the contribution of the halal and non-halal industry sectors to the Gross Domestic Product (GDP), as well as to formulate development strategies. This research uses a quantitative method with secondary data analysis from relevant institutions. The contribution analysis was performed using a value-added approach to separate the output of each sector. The results show that the halal industry makes a significant contribution to the national GDP, with the halal food and beverage, Muslim fashion, and Islamic finance sectors as the main drivers. Although its aggregate contribution is still below the non-halal sector, the growth rate of the halal sector shows a positive and potential trend. Based on the findings, development strategies were formulated focusing on strengthening the digital ecosystem, improving certification efficiency, and expanding export markets. The implication of this research is the need for more focused policy support to optimize the potential of the halal industry as a source of sustainable macroeconomic growth.

Keywords: GDP, Halal Industry, Macroeconomy, Non-Halal Sector

PENDAHULUAN

Dalam KNEKS dijelaskan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, kebutuhan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut kian mendesak dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal. Industri halal di Indonesia semakin berkembang dan luas. Saat ini tidak hanya sektor makanan dan minuman, tetapi juga sudah mencakup berbagai macam sektor seperti *fashion*, kosmetik, travel, hotel, media dan rekreasi.

Data BPS menunjukkan bahwa konsumen halal Indonesia akan mencapai 262,733 juta jiwa pada periode 2025-2030, dan 267,038 juta jiwa pada periode 2040-2045. Perkembangan

potensi konsumsi halal ini diperkirakan akan semakin besar dengan adanya dukungan bonus demografi, yang akan mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2034. Pada tahun tersebut, penduduk dengan usia produktif akan mendominasi, sehingga berpotensi pada meningkatnya konsumsi yang diperkirakan akan mencapai kurang lebih 60%.

Saat ini semakin banyak konsumen yang menuntut industri untuk mencantumkan secara transparan terkait asal-usul bahan-bahan dari produk-produk mereka. Kebanyakan konsumen muslim mencermati kesesuaian produk yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak hanya harus bebas dari bahan-bahan haram, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas. Gaya hidup halal bukan hanya menyangkut makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang mencerminkan semua aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut mulai dari mengkonsumsi makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, melakukan perjalanan wisata, hingga menikmati hiburan dari berbagai media.

Mengingat kontribusinya yang besar bagi perekonomian Indonesia, sangat penting untuk lebih memelihara industri halal. Setiap tahun, sektor ini menyuntikkan USD 3,8 miliar ke dalam PDB Indonesia dan menarik USD 1 miliar dalam investasi asing, menghasilkan penciptaan 127.000 peluang kerja (Kementerian Keuangan 2019). Perusahaan halal memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa melalui optimalisasi yang strategis. Untuk memenuhi pemanfaatan prospek ekonominya, Indonesia harus mendorong pengembangan industri halal.

Meskipun industri halal di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk pertumbuhan yang sangat cepat, industri halal masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan solusi. Hambatan utama termasuk kurangnya akan kesadaran publik dan pemahaman yang tidak memadai mengenai prinsip-prinsip halal di antara operator bisnis, infrastruktur dukungan halal yang tidak memadai, kesenjangan peraturan, dan akses pasar yang terbatas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, maka peneliti melakukan analisis ini untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan kontribusi industri halal terhadap PDB.(Garcia et al., n.d.)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan merupakan jenis studi kepustakaan (review literatur). Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur dan sumber sekunder, seperti referensi jurnal, laporan, informasi web, dan lainnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Subjek penelitian ini adalah sektor ekonomi Indonesia yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni industri halal dan non-halal. Penelitian ini berlandaskan pada data sekunder runtut waktu (periode 2020–2025) yang dihimpun melalui teknik dokumentasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menghitung proporsi dan pertumbuhan, secara komparatif untuk membandingkan kinerja ke dua sektor, dan diakhiri dengan analisis sintesis guna merumuskan rekomendasi strategi pengembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Industri Halal dan Konsep Ekonomi Syariah

Pengaturan industri halal di Indonesia di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.(Hida et al., 2021)

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perkerjasama industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.(Sulistiani, 2019)

kontribusi Industri Halal terhadap PDB

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019) Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar (Tim Publikasi Katadata 2020).(Fathoni, 2020)

Indonesia memiliki potensi yang besar dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yaitu sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Potensi halal dapat kita ketahui dari berbagai sektor, diantaranya sektor wisata halal, sektor pakaian muslim, sektor makanan halal, dan sektor keuangan syariah.(Aidina et al., 2023)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi besar sebagai pasar halal global. Indonesia mendapatkan angin segar dengan bertumbuhnya industri halal nasional. Kontribusi industri halal dapat dilihat melalui produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya termasuk kegiatan ekspor impor produk halal (Fathoni & Syahputri, 2020). Berdasarkan laporan Global Islamic Economy (GIE) pada tahun 2021 Indonesia secara umum menempati peringkat ke empat setelah sebelumnya Indonesia menempati peringkat 5 pada tahun 2019/2020 dan peringkat 10 pada tahun 2018/2019 (Thomson Reuters 2021). Namun prestasi tersebut masih belum mampu menempatkan Indonesia pada 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal.(Syahidin et al., 2024)

Dukungan pemerintah juga menjadi potensi besar industri makanan halal di Indonesia. Dukungan pemerintah ini terlihat dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory). Hal ini dilakukan dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslimserta untuk melejitkan industri halal di Indonesia, khususnya industri makanan halal.(Fathoni, 2020)

Perbandingan kontribusi sektor halal dan non halal

Perekonomian Indonesia ditopang oleh berbagai sektor, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi sektor halal dan non-halal. Sektor halal, yang mencakup produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Di sisi lain, sektor non-halal yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian tetap memberikan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sub-bab ini akan mengulas perbandingan kontribusi kedua sektor tersebut dengan merujuk pada data dan laporan terkini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang solid. PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp20.892,4 triliun.(BPS, 2024) Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh beberapa lapangan usaha utama yang secara kolektif menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Sektor-sektor dominan tersebut meliputi industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Sebagian besar aktivitas dalam sektor-sektor ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi konvensional atau non-halal, yang telah menjadi fondasi perekonomian sejak lama.

Industri halal di Indonesia, yang juga dikenal sebagai *Halal Value Chain* (HVC), menunjukkan potensi dan kontribusi yang semakin signifikan. Menurut Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pengembangan ekosistem industri halal menjadi salah satu prioritas nasional.(Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023) Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang kokoh di peringkat ketiga dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2023/2024.

Secara spesifik, kontribusi sektor halal tercermin dalam beberapa area kunci. Sektor makanan dan minuman halal menjadi penggerak utama karena besarnya populasi Muslim. Selain itu, aset keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan hal positif pada Desember 2024, total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp 980,30 triliun dengan pangsa pasar 7,72%.(Lps.go.id, 2004) Sektor lain yang menjadi andalan adalah *Fashion* Muslim dan pariwisata ramah Muslim yang terus digalakkan untuk menarik pasar domestik dan global. Besarnya irisan ekonomi halal dengan ekonomi nasional juga tercermin dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mayoritasnya bergerak di sektor halal, dimana dilaporkan menyumbang hingga 61% terhadap PDB nasional.(INDONESIA, 2024)

Secara kuantitatif, sektor non-halal saat ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia. Ini wajar mengingat cakupan ekonomi konvensional yang sangat luas dan telah mapan. Namun, laju pertumbuhan sektor halal menunjukkan potensi yang luar biasa untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Perbandingan antara kedua sektor ini sebaiknya tidak dilihat sebagai suatu kompetisi, melainkan sebagai sebuah sinergi. Industri halal hadir untuk melengkapi dan memperkuat struktur perekonomian nasional yang sudah ada. Misalnya, sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman dari industri pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tersebut.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa sektor non-halal merupakan penopang utama PDB Indonesia saat ini, sementara sektor halal adalah motor penggerak baru dengan tingkat pertumbuhan yang menjanjikan dan potensi besar untuk meningkatkan kontribusinya di masa depan. Pemerintah melalui KNEKS dan kementerian terkait terus mendorong penguatan ekosistem halal agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengembangan industri halal untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB

Berikut strategi yang tepat untuk meningkatkan pengembangan strategi kontribusi industri halal terhadap PDB:

1. Pembentukan klaster dan infrastruktur industri halal sebagai komponen penting pada ekonomi nasional. Dalam hal ini perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengetahui keberhasilan dan dampak yang akan terjadi.

2. Pengembangan sistem asuransi halal/Halal (HAS) yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan industri produk halal di seluruh negeri. Dengan adanya pengembangan ini, industri halal dapat meningkatkan keberhasilan bisnis serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
3. Peningkatan bagian industri halal dalam neraca perdagangan nasional di bidang-bidang penting.
4. Penguatan produk ekspor dan substitusi impor. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan membelanjakan USD 218,8 miliar di sektor halal, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin industri halal global. Jadi, untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, diperlukan rencana dalam meningkatkan produk domestik untuk pasar ekspor dan pasar impor. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing nasional.
5. Mengembangkan produk yang memenuhi jaminan produk halal dan sesuai dengan KEK.
6. Penguatan rantai nilai halal (halal value chain). Rantai nilai halal merupakan tahapan utama yang harus diperhatikan dalam membangun industri halal, mulai dari input hingga outcome-nya dalam industri halal.
7. Penguatan stakeholder industri halal, baik itu pemerintah, konsumen, industri, maupun investor. (Herianti et al., 2023)

KESIMPULAN

Industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, Indonesia berpeluang menjadi pusat industri halal global. Kontribusi industri halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus menunjukkan tren positif, dengan nilai mencapai USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan, 2019), serta potensi konsumsi halal yang diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pembentukan BPJPH menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Meskipun demikian, pengembangan industri halal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip halal, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta akses pasar yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat kontribusi sektor ini terhadap PDB. Strategi tersebut meliputi pembentukan klaster industri halal, penguatan rantai nilai halal (halal value chain), peningkatan daya saing produk ekspor, serta pengembangan sistem jaminan produk halal yang transparan dan terpercaya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, industri halal dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan sektor ini tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan cadangan devisa nasional. Dengan demikian, pengembangan industri halal merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka menggunakan Format APA dengan urutan secara alphabetik. Sumber pustaka yang ditulis dalam daftar pustaka sebelumnya harus pernah diacu dalam naskah.

Disarankan menggunakan tools seperti Mendeley, Zotero maupun *reference management tools* yang lain.

- Aidina, A., Sadiyah, B. H., & Inayati, R. (2023). Dampak Perekonomian Indonesia Terhadap Eksistensi Industri Halal. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 809–821.
- BPS. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 07130.2002, 151.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.).
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Hida, F. T., Basalamah, R., & Nurhidayati, N. (2021). Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Reflektika*, 16(1), 49. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i1.541>
- INDONESIA, K. (2024). *Profil Ekonomi Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/profil-ekonomi-indonesia/>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. In *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Lps.go.id. (2004). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).lps.go.id. *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. *Www.Lps.Go.Id*, 1, 1–67.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Syahidin, M. Nasor, & Agus Hermanto. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).15736](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736)